



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 116);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 12.155.523.000,00 (dua belas milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Alokasi DBH Pajak Daerah sebesar Rp.9.020.000.000,00 (sembilan milyar dua puluh juta rupiah);
 - b. Alokasi DBH Retribusi Daerah sebesar Rp.3.135.523.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
- a. 60 % (enam puluh per seratus) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa, yang selanjutnya disebut DBH Merata;
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa, yang selanjutnya disebut DBH Proporsional;
- (5) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$DBH_x = DBH \text{ Merata} + DBH \text{ Proporsional}_x$$

Keterangan :

- DBH_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa
- $DBH \text{ Merata}$: DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata yang diterima Desa
- $DBH \text{ Proporsional}_x$: DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa

- (6) DBH Merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan DBH Merata dibagi dengan jumlah Desa;
- (7) DBH Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$DBH \text{ Proporsional}_x = BD_x \times DBH \text{ Proporsional}$$

Keterangan :

- $DBH \text{ Proporsional}_x$: DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa

BD_x : Nilai bobot Desa untuk Setiap Desa

DBH Proporsional : Pagu DBH Proporsional

- (8) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data bobot Desa dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

Rincian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2021 untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

- (2) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	72.147.500,00	25.079.800,00	97.227.300,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulau	67.137.500,00	23.338.200,00	90.475.700,00	
62.01.01.2003	Sabuai	83.803.800,00	29.131.700,00	112.935.500,00	
62.01.01.2004	Keraya	73.355.400,00	25.499.600,00	98.855.000,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	94.347.000,00	32.796.700,00	127.143.700,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	74.471.600,00	25.887.700,00	100.359.300,00	
62.01.01.2007	Kubu	98.537.700,00	34.253.500,00	132.791.200,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	258.029.000,00	89.695.700,00	347.724.700,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	125.218.000,00	43.528.100,00	168.746.100,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	148.117.300,00	51.488.300,00	199.605.600,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	76.244.200,00	26.503.800,00	102.748.000,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	69.249.900,00	24.072.500,00	93.322.400,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	299.694.700,00	104.179.500,00	403.874.200,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	99.171.400,00	34.473.800,00	133.645.200,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	69.493.600,00	24.157.200,00	93.650.800,00	
	SUB TOTAL	1.709.018.600,00	594.086.100,00	2.303.104.700,00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	72.512.200,00	25.206.500,00	97.718.700,00	
62.01.02.2004	Pasir Paniang	701.640.200,00	243.903.400,00	945.543.600,00	
62.01.02.2010	Rangda	67.720.500,00	23.540.800,00	91.261.300,00	
62.01.02.2011	Kenambui	71.517.800,00	24.860.900,00	96.378.700,00	
62.01.02.2012	Runtu	138.177.200,00	48.032.900,00	186.210.100,00	
62.01.02.2013	Umpang	67.596.400,00	23.497.700,00	91.094.100,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	88.730.600,00	30.844.400,00	119.575.000,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	130.205.000,00	45.261.600,00	175.466.600,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	89.730.400,00	31.191.900,00	120.922.300,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	172.520.500,00	59.971.300,00	232.491.800,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	82.733.100,00	28.759.500,00	111.492.600,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	80.340.100,00	27.927.600,00	108.267.700,00	
62.01.02.2020	Sulung	92.105.900,00	32.017.700,00	124.123.600,00	
	SUB TOTAL	1.855.529.900,00	645.016.200,00	2.500.546.100,00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babual Baboti	91.926.100,00	31.955.200,00	123.881.300,00	
62.01.03.2002	Tempayung	67.587.200,00	23.494.500,00	91.081.700,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	79.197.700,00	27.530.500,00	106.728.200,00	
62.01.03.2004	Kinjil	67.503.000,00	23.465.200,00	90.968.200,00	
62.01.03.2005	Dawak	151.821.800,00	52.776.000,00	204.597.800,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	158.784.600,00	55.196.400,00	213.981.000,00	
62.01.03.2009	Lalang	75.344.600,00	26.191.100,00	101.535.700,00	
62.01.03.2010	Rungun	75.087.600,00	26.101.800,00	101.189.400,00	
62.01.03.2011	Kondang	67.000.700,00	23.290.600,00	90.291.300,00	
62.01.03.2012	Suka Java	70.530.600,00	24.517.700,00	95.048.300,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	105.874.900,00	36.804.000,00	142.678.900,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	94.996.500,00	33.022.500,00	128.019.000,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	91.145.600,00	31.683.800,00	122.829.400,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	100.467.000,00	34.924.100,00	135.391.100,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulva	85.226.800,00	29.626.400,00	114.853.200,00	
	SUB TOTAL	1.382.494.700,00	480.579.800,00	1.863.074.500,00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	70.209.400,00	24.406.000,00	94.615.400,00	
62.01.04.2003	Sukarami	66.814.800,00	23.226.000,00	90.040.800,00	
62.01.04.2004	Gandis	67.007.100,00	23.300.400,00	90.307.500,00	
62.01.04.2005	Kerabu	71.597.900,00	24.888.700,00	96.486.600,00	
62.01.04.2006	Sambi	98.282.700,00	34.164.800,00	132.447.500,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	66.814.800,00	23.226.000,00	90.040.800,00	
62.01.04.2008	Pandau	66.814.800,00	23.226.000,00	90.040.800,00	
62.01.04.2009	Riam	69.384.400,00	24.119.200,00	93.503.600,00	
62.01.04.2010	Panahan	71.483.700,00	24.849.000,00	96.332.700,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	66.814.800,00	23.226.000,00	90.040.800,00	
	SUB TOTAL	715.224.400,00	248.632.100,00	963.856.500,00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	194.218.300,00	67.513.900,00	261.732.200,00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjava	298.936.300,00	103.915.800,00	402.852.100,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	106.656.200,00	37.075.600,00	143.731.800,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	83.391.000,00	28.988.200,00	112.379.200,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	145.332.700,00	50.520.300,00	195.853.000,00	
62.01.05.2006	Purbasari	142.204.400,00	49.432.800,00	191.637.200,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	105.484.700,00	36.668.400,00	142.153.100,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	279.296.300,00	97.088.600,00	376.384.900,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	121.115.300,00	42.101.900,00	163.217.200,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	123.492.500,00	42.928.200,00	166.420.700,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	109.565.900,00	38.087.100,00	147.653.000,00	
	SUB TOTAL	1.709.693.600,00	594.320.800,00	2.304.014.400,00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	155.209.900,00	53.953.800,00	209.163.700,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	75.469.100,00	26.234.400,00	101.703.500,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	194.300.000,00	67.542.300,00	261.842.300,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	83.695.300,00	29.094.000,00	112.789.300,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	88.665.000,00	30.821.500,00	119.486.500,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	87.747.000,00	30.502.400,00	118.249.400,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	103.486.200,00	35.973.700,00	139.459.900,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	90.816.900,00	31.569.600,00	122.386.500,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	89.284.200,00	31.036.800,00	120.321.000,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	93.006.400,00	32.330.700,00	125.337.100,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	80.460.500,00	27.969.500,00	108.430.000,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	88.999.100,00	30.937.700,00	119.936.800,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	96.598.400,00	33.579.300,00	130.177.700,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	76.520.900,00	26.600.000,00	103.120.900,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	80.659.800,00	28.038.800,00	108.698.600,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	78.043.900,00	27.129.500,00	105.173.400,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	85.076.200,00	29.574.000,00	114.650.200,00	
	SUB TOTAL	1.648.038.800,00	572.888.000,00	2.220.926.800,00	
	TOTAL	9.020.000.000,00	3.135.523.000,00	12.155.523.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

